



Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta terhadap ketimpangan pendapatan dengan dana perimbangan sebagai variabel moderasi di Provinsi Kalimantan Timur

Achmad Efendi^{1*}, Priyagus²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulwarman

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan, mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel investasi swasta terhadap ketimpangan pendapatan, mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan, mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan sebagai variabel moderasi dari variabel pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan serta mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan sebagai variabel moderasi dari variabel investasi swasta terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian ditemukan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur, variabel investasi swasta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur, variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Variabel dana perimbangan sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur, dan variabel dana perimbangan sebagai variabel moderasi memperlemah pengaruh antara investasi swasta terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga dana perimbangan sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap Ketimpangan pendapatan dan memperlemah investasi swasta terhadap Ketimpangan pendapatan.

Kata kunci: Pertumbuhan ekonomi; investasi swasta; dana perimbangan; ketimpangan pendapatan

The effect of economic growth and private investment on income inequality with balanced funds as a moderation variable in East Kalimantan Province

Abstract

This research aims to find out and analyze the influence of economic growth variables on income inequality, know and analyze the influence of private investment variables on income inequality, know and analyze the influence of balanced fund variables on income inequality, know and analyze the influence of balanced funds as moderation variables of economic growth variables on income inequality and know and analyze the effect of equalization funds as a moderation variable of private investment variables on income inequality. The results of the study found that the Economic Growth variable had a positive and significant effect on income inequality in East Kalimantan Province, the private investment variable had a negative and significant effect on income inequality in East Kalimantan Province, the equalization fund variable had a positive and insignificant effect on income inequality in East Kalimantan Province. The balance fund variable as a moderation variable strengthens the influence between economic growth on income inequality in East Kalimantan Province, and the equalization fund variable as a moderation variable weakens the influence between private investment on income inequality in East Kalimantan Province, so that the balance fund as a moderation variable strengthens the influence between economic growth on income inequality and weakens private investment on Income inequality.

Key words: Economic growth; private investment; equalization fund; income inequality

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata agar tidak terjadi kesenjangan diantara masyarakat.

Kesenjangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini tercermin dari perbedaan pendapatan (Robert E Baldwin, 1986:16). Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah tentunya akan membawa pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Penerapan otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Implementasi otonomi daerah atau desentralisasi yang luas sekarang ini memiliki tujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Dalam konsep otonomi daerah diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat, berdemokrasi yang juga berarti pemberian tanggung jawab kepada seluruh masyarakat, sehingga menghadirkan peluang untuk mempercepat perolehan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Implementasi otonomi daerah berarti daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata. Ketimpangan pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berdampak pada keseimbangan perputaran kegiatan ekonomi yang berpengaruh pada ketimpangan kemakmuran antar daerah yang bersangkutan. Provinsi Kalimantan Timur menempati posisi atau urutan ke 12 dengan ketimpangan terendah se-Indonesia pada tahun 2018. Namun demikian, ketimpangan ini masih sangat perlu untuk diwaspadai dan perlu mendapatkan perhatian serius. Melihat Kalimantan Timur masih mengandalkan Sumber Daya Alamnya yakni sektor pertambangan. Kondisi demikian akan lebih baik jika beralih ke sektor yang mampu membuat Sumber Daya Manusia lebih tumbuh merata.

Melalui UU Nomor 33 Tahun 2004, diharapkan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Relevan dengan tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah adalah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (*equalizing transfer*) (Ehtisham, 2002:5). Oleh karena itu upaya mewujudkan pemerataan ketimpangan pembangunan antar daerah menjadi sangat penting agar tujuan dari pembangunan yakni peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup masyarakat dapat terwujud secara bersama-sama baik pada tingkat regional maupun Nasional.

Provinsi Kalimantan Timur yang juga menjadi salah satu daerah otonomi semenjak diberlakukannya desentralisasi pembangunan di Kalimantan Timur dari tahun ke tahun makin terus meningkat. Perkembangan tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya potensi yang besar, yaitu potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusianya. Realisasi dana perimbangan di Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 selalu mengalami peningkatan dengan nilai tertinggi yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 6.071.586.086 kemudian mengalami penurunan berturut-turut dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dengan realisasi terendah pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.533.009.586.

Periode yang sama, investasi swasta juga setiap tahunnya mengalami naik dan turunnya peningkatan, jika dana perimbangan sejak tahun 2012 mengalami penurunan, namun investasi swasta mengalami peningkatan dan angka realisasi penerimaan tertinggi sebesar Rp. 42,287,082,898,300 pada tahun 2015.

Tabel 1
Dana Perimbangan dan Investasi Swasta Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007-2017 (Miliar Rupiah)

Tahun	Dana Perimbangan	PMDN + PMDA (Rp)
2007	3.096.452.203	716,565,038,813

2008	4.050.186.678	255,199,613,505
2009	3.122.061.454	1,526,299,815,250
2010	4.308.464.375	18,262,746,227,898
2011	5.295.875.915	30,890,193,160,962
2012	6.071.586.086	34,273,220,000,000
2013	5.335.759.150	35,382,637,550,000
2014	4.253.320.982	31,635,738,016,726
2015	4.024.025.055	42,287,082,898,300
2016	3.941.626.961	24,615,376,318,400
2017	3.533.009.586	28,760,814,830,400

Sumber: BPS Kalimantan Timur 2019

Selain faktor dana perimbangan, dinamika investasi swasta atau penanaman modal swasta juga turut mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Setiap daerah senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri tetapi juga investor asing.

Menurut Harrod Domar, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal seperti penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing (Arsyad, 1999:112).

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar, menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah (Tambunan, 2003:78). Hasil penelitian yang dilakukan Made (2013) investasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan penelitian Frans (2016) bahwa investasi swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori dan hasil penelitian, keadaan pertumbuhan dan investasi swasta tidak menunjukkan hal yang demikian, dapat dilihat pada tabel bahwa sejak pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan, dengan angka terendah -0,38 pada tahun 2016, sedangkan investasi swasta masih mengalami peningkatan dan tahun 2015 dengan realisasi investasi tertinggi.

Pertumbuhan menunjukkan gambaran bahwa minat berinvestasi di Kalimantan Timur cukup tinggi, namun pada kenyataannya peningkatan tersebut tidak begitu memicu kenaikan Keadaan pertumbuhan ekonomi kalimantan timur.

Tabel 2
PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio Provinsi Kalimantan Timur
2007-2017.

Tahun	PDRB (DHK) Miliar Rupiah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Gini Ratio (%)
2007	98386.38	1.84	0.351
2008	103206.87	4.90	0.362
2009	105564.96	2.28	0.379
2010	418211.58	5.10	0.368
2011	445264.42	6.47	0.323
2012	469646.25	5.48	0.363
2013	438532.91	2.76	0.366
2014	446029.05	1.71	0.361
2015	440676.36	-1.20	0.315
2016	439003.83	-0.38	0.328
2017	452741.91	3.13	0.333

Sumber: BPS Kalimantan Timur 2019

Dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan, Jika melihat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur menurunnya PDRB tidak membuat ketimpangan menjadi meningkat, justru pada tahun 2015 PDRB menurun, ketimpangan pendapatan juga menurun dari yang awalnya 0,361 pada tahun 2014

turun menjadi 0.315 pada tahun 2015. Hal inilah yang dikatakan dengan pertumbuhan yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa ketimpangan akan rendah. Banyak Negara Sedang Berkembang (NSB) yang mempunyai pertumbuhan ($\pm > 7\%$ /tahun), tetapi ketimpangan dan kemiskinannya juga tinggi. Hal ini menimbulkan tuntutan untuk lebih mementingkan pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

KAJIAN PUSTAKA

Ketimpangan Pendapatan

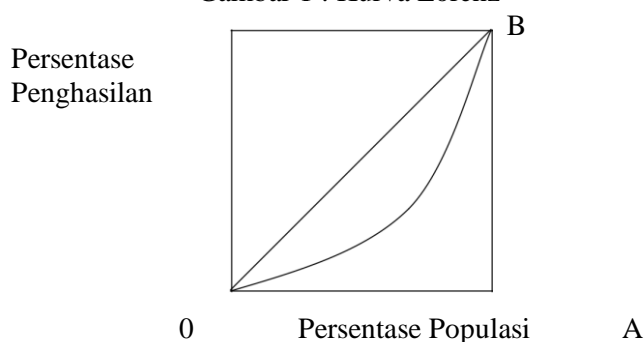
Kesenjangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini tercermin dari perbedaan pendapatan (Robert E Baldwin, 1986:16). Masalah kesenjangan pendapatan sering juga diikhtisarkan, bahwa pendapatan riil dari yang kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang. Ini berarti bahwa pendapatan riil dari yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin (Bruce Herrick/Charles P Kindleberger, 1988 : 171).

Sedangkan menurut Dumairy (1996:68), alasan penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita menimbulkan masalah ketenagakerjaan.

Menurut Parvez Hasan (dalam Bintoro, 1986:88) ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan kesempatan untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhan pokok semakin kecil. Indikator untuk mengetahui ketimpangan dan kesenjangan pendapatan dapat dilakukan dengan Kurva Lorenz. Cara umum yang lain melihat penghasilan pribadi adalah dengan membuat apa yang dinamakan dengan Kurva Lorenz.

Pada Gambar 1 diperlihatkan bagaimana cara membuat Kurva Lorenz. Jumlah penerimaan penghasilan ditempatkan diatas sumbu horizontal sedangkan sumbu vertikal menggambarkan bagian jumlah penghasilan yang diterima oleh masing-masing persentase populasi. Kedua sumbu tersebut dikombinasikan sampai dengan 100 persen. Dengan demikian kedua sumbu tersebut sama panjang dan semua angka ditempatkan dalam bujur sangkar. Pada garis diagonal, yang merupakan garis persamaan digambarkan dari sudut bawah sebelah kiri bujur sangkar menuju kearah sebelah kanan pada sudut atas Kurva Lorenz tersebut.

Gambar 1 : Kurva Lorenz



Sumber : M.P. Todaro, 1993:196

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif yang aktual antara persentase-persentase penerimaan penghasilan yang mereka terima sebenarnya. Semakin jauh Kurva Lorenz dari garis diagonal berarti semakin besar pula ketimpangan pendapatan yang terjadi, dan sebaliknya semakin dekat Kurva Lorenz dengan garis diagonal maka akan semakin kecil tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi.

Investasi Swasta

Investasi adalah mereka yang memiliki pendapatan, yang dipergunakan bukan untuk tujuan konsumsi melainkan investasi. Investasi, dalam pengertian sehari-hari adalah menanamkan uang saat

ini untuk mendapatkan manfaat di kemudian hari. Dengan kata lain, investasi adalah awal dari suatu kegiatan bisnis. Dari sisi pengertian investasi di atas, investasi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok penting, yaitu (Noor, 2007: 434):

a) Investasi yang terjadi karena suatu keharusan

Adalah investasi yang terjadi secara otomatis, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup seseorang, atau sekelompok orang, atau suatu organisasi, bahkan negara. Investasi jenis ini didorong oleh kebutuhan di masa depan.

b) Investasi yang terjadi karena keinginan

Adalah investasi yang disengaja karena diinginkan atau disengaja oleh seseorang, atau sekelompok orang, atau suatu organisasi, karena keinginan masa depan. Investasi jenis ini lebih condong pada pengertian ekonomi atau bisnis, yaitu usaha yang terkait dengan tujuan mendapatkan manfaat di kemudian hari.

Bila dilihat dari jenisnya, investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut (Noor, 2007: 437):

a) Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis). Misalnya investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko dan jenis usaha lainnya. Pada umumnya, dalam pembicaraan sehari-hari jenis investasi ini disebut juga investasi pada aset riil, atau investasi yang jelas wujudnya dan mudah dilihat. Tambahan lagi investasi langsung ini menghasilkan dampak berganda (*multiplier effect*) yang besar bagi masyarakat luas. Investasi langsung ini akan menghasilkan dampak ke belakang, berupa input usaha, maupun ke depan, dalam bentuk output usaha yang merupakan input bagi usaha lain.

b) Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*)

Adalah investasi pada aset finansial, bukan pada aset atau faktor produksi. Contoh dari investasi tidak langsung ini, adalah: deposito, investasi pada surat berharga (sekuritas), seperti saham dan obligasi, CP (*Commercial Paper*), reksadana dan sebagainya. Investasi pada aset keuangan ini juga bertujuan untuk mendapatkan manfaat masa depan. Manfaat masa depan dari investasi ini lebih dikenal dengan balas jasa investasi, atau untuk menyederhanakannya disebut dengan istilah bunga.

Selanjutnya dilihat dari karakteristiknya, investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut (Noor, 2007: 439-441):

i. Investasi Publik

Adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, untuk membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat (publik). Investasi dengan karakteristik seperti ini, bersifat nirlaba, atau *nonprofit motive*, seperti pembangunan jalan dan jembatan, sekolah, taman, pasar, rumah sakit dan sarana serta prasarana publik lainnya.

ii. Investasi Swasta

Adalah investasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha atau investor, dengan tujuan mendapatkan manfaat berupa laba. Investasi jenis ini disebut juga dengan istilah investasi dengan *profit motive*. Investasi dengan karakteristik seperti ini dapat dilakukan oleh pribadi atau perusahaan baik pelaku domestik maupun pelaku asing, yang meliputi DII (*Domestic Indirect Investment*), FII (*Foreign Indirect Investment*), DDI (*Domestic Direct Investment*) dan FDI (*Foreign Direct Investment*).

Dana Perimbangan

Potensi Sumber Daya Alam dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda beda, masalah akan timbul jika potensi sumber daya yang dimiliki daerah lebih kecil dibanding dengan kebutuhan belanja daerah yang dianggarkannya. Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada pasal 1 undang – undang ini menyatakan bahwa yang di maksud dengan perimbangan

keuangan antata pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang Proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban, pembagian kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut.

Pembentukan Undang-Undang tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atau penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing masing tingkat pemerintahan.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan fungsi alokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena pemerintahan daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Dana perimbangan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di alokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 159 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Dana perimbangan terdiri atas :

1. Dana bagi hasil
2. Dana alokasi umum
3. Dana alokasi Khusus

Dana Perimbangan yang terdiri atas tiga jenis sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat di pandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dana bagi hasil bukan pajak suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat dari suatu periode ke periode berikutnya.

Menurut Simon dalam Todaro (2008:144), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam dana bagi hasil bukan pajak suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya. Dana bagi hasil bukan pajak ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang di perlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (Tiga) komponen: Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang dan jasa: Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan dana bagi hasil bukan pajak dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi baru secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Menurut sukimo (2001:10) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sedangkan menurut Boediono dalam Setianingrum, Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dalam pengertiannya teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP (*gross domestic product*) dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut

dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Beberapa teori yang menerangkan mengenai hubungan diantara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Disini dijelaskan pandangan mengenai teori pertumbuhan Linier yang mana dasar pemikiran dari model ini menerangkan bahwa pembangunan suatu negara selalu melalui tahapan tahapan tertentu (evolusi), diantaranya adalah:

1. Teori Pertumbuhan Adam Smith
 Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa berternak, masa bercocok tanam, perdagangan dan terakhir adalah tahap perindustrian.
2. Teori Pertumbuhan Rostow
 Teori Rostow di dasarkan pada pengalaman pembangunan yang telah dialami Negara-negara maju terutama di Eropa, dengan mengamati proses pertengahan hingga abad modern, kemudian Rostow memformulasikan pola pembangunan yang ada menjadi tahap tahap evolusi dari suatu pembangunan yang dilakukan oleh negara negara tersebut. Rostow membagi proses pembangunan suatu negara menjadi lima tahap yaitu:
 - a). Perekonomian tradisional
 - b). Prakondisi tinggal landas
 - c). Tinggal Landas
 - d). Tahap menuju Kedewasaan
 - e). Tahap konsumsi massa tinggi

Kerangka Konseptual



Gambar 2 Kerangka Konsep Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dan dasar teori, serta kerangka konsep penelitian, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur.
2. Investasi swasta berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur.
3. Dana perimbangan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur.
4. Dana perimbangan sebagai variabel moderasi mampu memperkuat pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur.
5. Dana perimbangan sebagai variabel moderasi mampu memperkuat pengaruh variabel investasi swasta terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur.

METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional

Adapun penggunaan variabel dalam penelitian ini dapat dioperasikan sebagai berikut:

1. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat.
 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independen) adalah sebagai berikut :
 - a) Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Dalam penelitian ini Pertumbuhan Ekonomi adalah Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen). Provinsi Kalimantan Timur dalam miliar rupiah dan kurun waktu 2007-2017.

b) Investasi swasta (X2)

Dalam penelitian ini investasi swasta adalah Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan luar negeri (PMA) penjumlahan tahun 2007 dan 2006 sampai dengan tahun 2016 dijumlahkan dengan tahun 2017 dalam triliun rupiah di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (dependen) adalah sebagai berikut:

a) Ketimpangan Pendapatan (Y)

Dalam penelitian ini ketimpangan adalah Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. yang datanya berdasarkan Gini rasio perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2007-2017.

3. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel Moderasi adalah:

a) Dana Perimbangan (Z)

Dana Perimbangan dalam penelitian ini adalah Realisasi Dana Penerimaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2007-2017 dalam miliar rupiah

B. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan cara memperolehnya, data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Menurut Kuncoro (2009: 145) data sekunder adalah “data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data”. Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah “mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya” (Arikunto, 2006: 158). Dokumentasi diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur dan Badan Pusat Statistik Indonesia.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Mempelajari serta mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari arsip data yang sudah diolah oleh BPS

D. Model dan Alat Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan statistik. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda dengan menggunakan program *Statistic Package for Social Sciences* (SPSS) Versi 21.0

Berdasarkan pada kerangka konseptual dan model analisis dalam penelitian ini, maka kemudian data yang di uji dengan teknik analisis regresi moderasi MRA (*Moderated Regression Analysis*) yang jika dimasukkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap ketimpangan dengan dana perimbangan sebagai variabel moderasi.

Sehingga persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Persamaan (Moderasi)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3Z + b_4X_1*Z + b_5X_2*Z + e$$

Keterangan:

Y = Ketimpangan

X1 = Pertumbuhan Ekonomi

X2 = Investasi Swasta

Z = Variabel Moderasi (Dana Perimbangan)

a = Konstanta

b1- b3 = Koefisien regresi variabel X1, X2, dan Z

b4 – b5= Koefisien Variabel Moderasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan jalur dalam model dengan menggunakan analisis moderasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Swasta Terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan Dana Perimbangan sebagai Moderasi.

Tabel 3
Nilai Koefisien moderasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	,328	,071	
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	,039	,016	4.452
Investasi Swasta (X2)	-1,034E-013	,000	-4.467
Dana Perimbangan (Z)	8,877E-012	,000	,386
Z*X1	-9,478E-012	,000	-5.604
Z*X2	1,000E-013	,000	4.817

Sumber: Hasil output SPSS

Pada persamaan (moderasi), dapat diketahui sebagai berikut:

$$Y = 0.328 + 0.039 X1 - 1,034E-013 X2 + 8,877E-012 Z - 9,478E-012 X1 * Z + 1,000E-013 X2 * Z + e$$

Berdasarkan model moderasi yang dihasilkan tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien Variabel Pertumbuhan Ekonomi (0.039), artinya jika variabel eksogen lainnya tetap dan Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan 1 (satu miliar rupiah), maka Ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan sebesar 0.039. Koefisien ini bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara Pertumbuhan Ekonomi dengan ketimpangan pendapatan, semakin naik Pertumbuhan Ekonomi maka semakin naik ketimpangan pendapatan.
2. Nilai koefisien Variabel investasi swasta (-1,034E-013), artinya jika variabel eksogen lainnya tetap dan investasi swasta mengalami kenaikan 1 (satu triliun rupiah), maka Ketimpangan pendapatan mengalami penurunan sebesar 1,034E-013. Koefisien ini bernilai negatif artinya terjadi hubungan yang negatif antara investasi swasta dengan ketimpangan pendapatan, semakin naik investasi swasta maka semakin menurun ketimpangan pendapatan.
3. Nilai koefisien Variabel dana perimbangan (8,877E-012), artinya jika variabel eksogen lainnya tetap dan dana perimbangan mengalami kenaikan 1 (satu miliar rupiah), maka Ketimpangan pendapatan juga mengalami kenaikan sebesar 8,877E-012. Koefisien ini bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara dana perimbangan dengan ketimpangan pendapatan, semakin naik dana perimbangan maka semakin naik pula ketimpangan pendapatan.
4. Nilai koefisien Moderat 1 yaitu (-9,478E-012), artinya jika variabel eksogen lainnya tetap dan Moderat 1 mengalami kenaikan 1 (satu miliar rupiah), maka Ketimpangan pendapatan mengalami penurunan sebesar 9,478E-012. Koefisien ini bernilai negatif artinya terjadi hubungan yang negatif antara Moderat 1 dengan ketimpangan pendapatan, semakin naik Moderat 1 maka semakin menurun ketimpangan pendapatan.
5. Nilai koefisien Moderat 2 yaitu (1,000E-013), artinya jika variabel eksogen lainnya tetap dan Moderat 2 mengalami kenaikan 1 (satu triliun rupiah), maka Ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan sebesar 1,000E-013. Koefisien ini bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara Moderat 1 dengan ketimpangan pendapatan, semakin naik Moderat 1 maka semakin meningkat pula ketimpangan pendapatan.

Pengujian Hipotesis

a. Uji F (Uji Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel bebas dengan variabel terkait secara bersamaan. Hasil pengujian F sebagai berikut:

Tabel 4
Perhitungan nilai F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,004	5	,001	3.984	.078 ^b
Residual	,001	5	,000		
Total	,005	10			

Sumber: Hasil output SPSS

Tabel 5.5 pada pengujian ANOVA melalui F Test, diketahui pada model, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan secara simultan, dibuktikan dengan F-hitung sebesar 3.984 dengan signifikansi 10% maka diperoleh F-tabel sebesar 0.301. hasil ini menunjukkan bahwa F-hitung > F-tabel ($3.984 > 0.419$), artinya menolak H_0 dan menerima H_1 . Sehingga sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan atau hubungan linier pada model yaitu Pertumbuhan Ekonomi, investasi swasta, dana perimbangan, interaksi X1 dan Z, dan X2 dan Z berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur.

b. Uji t (Uji Parsial)

Uji parsial ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel Pertumbuhan ekonomi, investasi swasta dan dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur secara individual. Hasil pengujian Uji parsial sebagai berikut:

Tabel 5
Uji Parsial (t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,328	,071		4.634	.006
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	,039	,016	4.452	2.416	.060
1 Investasi Swasta (X2)	-1,034E-013	,000	-4.467	-3.258	.023
Dana Perimbangan (Z)	8,877E-012	,000	.386	.411	.698
Z*X1	-9,478E-012	,000	-5.604	-2.666	.045
Z*X2	1,000E-013	,000	4.817	2.536	.052

Sumber: Hasil output SPSS

Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hasil analisis menunjukkan variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Terlihat dari tabel bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel $2.416 > 2.015$, serta diperoleh nilai signifikan sebesar 0.060 (sig. < 0.10).
- 2) Hasil analisis menunjukkan variabel Investasi swasta (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Terlihat dari tabel bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel $-3.258 < 2.015$ serta diperoleh nilai signifikan sebesar 0.023 (sig. < 0.10).
- 3) Hasil analisis menunjukkan variabel Dana Perimbangan (Z) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Terlihat dari

tabel bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel $0.411 < 2.015$ serta diperoleh nilai signifikan sebesar 0.698 (sig. > 0.10).

- 4) Hasil analisis menunjukkan variabel moderat 1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Terlihat dari tabel bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel $-2.666 < 2.015$ serta diperoleh nilai signifikan sebesar 0.045 (sig. < 0.10).
- 5) Hasil analisis menunjukkan variabel moderat 2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Terlihat dari tabel bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel $2.536 > 2.015$ serta diperoleh nilai signifikan sebesar 0.052 (sig. < 0.10).

c. Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi

Hasil analisis ini digunakan untuk menjawab uji koefisien korelasi determinasi. Analisis koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. R^2 mampu memberikan informasi mengenai variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi yang digunakan. Apabila R^2 mendekati angka satu berarti terdapat hubungan yang kuat. Nilai R dan R^2 yang diperoleh dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Analisis koefisien Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.894 ^a	.799	.599	.01359	3.164

Sumber: Hasil output SPSS

Mengacu pada tabel, diperoleh nilai korelasi (R) 0.894 menandakan interval korelasi antara $0.800 - 1.000$ (tingkat hubungan sangat kuat). Besarnya R-squared (R^2) yang diperoleh adalah 0.799 angka tersebut menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan hubungan dengan kategori sedang antara Pertumbuhan Ekonomi, investasi swasta, dana perimbangan dan moderasi 1, moderasi 2 terhadap ketimpangan pendapatan (Y) yakni 79.90% . Sedangkan sisanya ($100\% - 79.90\% = 20,1\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian pada maka dapat diketahui nilai masing-masing variabel bebas dan variabel terkait serta variabel moderasi dapat dijelaskan pada gambar sebagai berikut:

Pembahasan

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Terlihat dari nilai koefisien sebesar 0.039 , artinya jika variabel eksogen lainnya bernilai tetap dan Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan 1 (satu miliar rupiah), maka ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan sebesar 0.039 . Kemudian terlihat dari tabel bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel $2.416 > 2.015$, serta diperoleh nilai signifikan sebesar 0.060 (sig. < 0.10).

Penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Lundberg dan Squire (2003) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi ketimpangan pendapatan.

Temuan penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian Fobes dan Frank, Chingano (2014) bahwa mereka membuktikan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Penelitian Ali (2014) di Pakistan juga menemukan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Demikian juga dengan hasil kajian Qin et al. (2009) menyimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan berdampak negatif terhadap GDP dan pertumbuhan ekonomi sektoral.

Selanjutnya temuan penelitian ini juga berbeda dengan bukti empiris yang ditemukan oleh Barro (2000) dan Huang et al. (2015) bahwa di Negara berpendapatan rendah terdapat

hubungan negatif antara Pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Bukti empiris yang lain seperti dengan temuan penelitian Chamber (2010), Wahiba dan El Weriemmi (2004) dan Rubin & Segal (2015) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif dengan ketimpangan pendapatan.

Pembangunan ekonomi yang merupakan proses untuk menyebabkan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk dalam jangka panjang disertai perbaikan distribusi pendapatan dan pergeseran struktur ekonomi, seharusnya akan terasa pengaruhnya secara langsung terhadap perekonomian masyarakat, kemudian pertumbuhan Ekonomi merupakan kunci untuk mengatasi masalah kemiskinan, melindungi lingkungan dan memperkuat tatanan sipil. Pertumbuhan Ekonomi menjadi syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun pada hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang ada belum juga menunjukkan hasil atau pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur yang diakibatkan juga oleh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan bukan dari sebagian besar masyarakat, tetapi hanya beberapa golongan kecil saja sehingga pengaruhnya sedikit sekali.

Perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika sebagian kecil orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan. Sebaliknya jika sebagian besar yang turut berpartisipasi dalam peningkatan Pertumbuhan Ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan Gap antara orang kaya dengan orang miskin dapat diperkecil, Todaro (2006).

Investasi Swasta Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Variabel Investasi swasta (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Terlihat dari nilai koefisien sebesar $-1.034E-013$ artinya jika variabel eksogen lainnya bernilai tetap dan investasi swasta mengalami kenaikan 1 (satu triliun rupiah), maka ketimpangan pendapatan mengalami penurunan sebesar $-1.034E-013$. Kemudian Terlihat dari tabel bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel $-3.258 < 2.015$ serta diperoleh nilai signifikan sebesar 0.023 (sig. < 0.10).

Menurut Tambunan (2003:120), investasi yang besar harus dilakukan sehingga dapat memberikan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang maksimal, dikarenakan salah satu tujuan dari penanaman investasi adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sejalan dengan Sukirno (2002:367), Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran rakyat.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoga (2006) yang menyatakan bahwa pertumbuhan investasi meningkatkan tingkat kesenjangan pendapatan dan investasi swasta mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian juga sejalan dengan penelitian I Gusti (2014) yang menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan.

Investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi yang terkonsentrasi hanya di beberapa daerah akan menjadi salah satu penyebab adanya ketimpangan pendapatan.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah mengarah pada upaya menurunkan angka ketimpangan. Peluang investasi di berbagai sektor masih sangat besar potensinya,

sehingga dalam mendukung keberlanjutan membaiknya kinerja investasi swasta pemerintah harus menciptakan stabilisasi baik di bidang politik, sosial dan ekonomi (Hadi 2010).

Temuan Bukhari (2008) diperkuat oleh Ahmad (2008) dimana ketidakstabilan ekonomi politik dan ketidakpastian berpengaruh negatif terhadap investasi swasta sektor pertanian di Pakistan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa stabilitas makro dan kredibilitas politik merupakan kunci utama pencapaian respon investasi yang kuat.

Hasil penelitian ini jika digambarkan langsung dengan keadaan di Provinsi Kalimantan Timur bahwa investasi yang ada belum mampu memberikan dampak atau pengaruh yang berarti terhadap ketimpangan pendapatan dikarenakan investasi yang dilakukan hanya terjadi pada sedikit lembaga dan perusahaan yang memang sudah pada status atau tingkatan besar dan dengan lingkup yang terbatas, sehingga sebagian besar masyarakat tidak begitu berdampak pada peningkatan tersebut. Proses perizinan serta budaya masyarakat juga menjadi faktor pertimbangan para investor untuk berinvestasi.

Peningkatan realisasi PMDN dan PMA juga harus didukung iklim investasi yang kondusif. Menurut World Bank (2005), empat faktor yang paling berpengaruh adalah stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi dan kepastian kebijakan ekonomi. WEF (2005) mengkonfirmasi bahwa birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang buruk dan regulasi perpajakan yang kurang kondusif merupakan faktor penghambat utama bisnis di Indonesia.

Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Variabel Dana Perimbangan (Z) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Terlihat dari nilai koefisien sebesar $8.877E-012$, artinya jika variabel eksogen lainnya bernilai tetap dan dana perimbangan mengalami kenaikan 1 (satu miliar rupiah), maka ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan sebesar $8.877E-012$. Kemudian terlihat dari tabel bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel $0.411 < 2.015$ serta diperoleh nilai signifikan sebesar 0.698 (sig. > 0.10).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahroji (2005) dan Waluyo (2007) bahwa dampak desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Didalam penelitiannya juga terdapat hasil bahwa semenjak diberlakukannya desentralisasi pada tahun 2001 disparitas justru semakin meningkat dan memperburuk ketimpangan.

Berdasarkan hasil penelitian, Provinsi Kalimantan Timur belum mampu mengalokasikan anggaran dana perimbangan dengan baik, penggunaan hanya pada bagian pembiayaan rutin yang bukan pada tahap pengembangan dan percepatan pembangunan. Terlihat bahwa dana perimbangan yang seharusnya mampu memberikan dampak penurunan terhadap ketimpangan justru memberikan dampak peningkatan sedangkan pelaksanaan desentralisasi fiskal tercantum dalam uu nomor 32 dan 33 tahun 2004 yang dimana setiap daerah diberikan wewenang untuk mengelola potensi daerahnya dan meningkatkan kinerja keuangannya.

Untuk mencegah agar ketimpangan tidak terus melebar diperlukan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali potensi daerahnya dan melukan peran alokasi serta mandiri dalam menetapkan prioritas (Sasana, 2009).

Dana Perimbangan sebagai variabel moderasi dari variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan

Hasil analisis menunjukkan variabel moderat 1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Terlihat dari nilai koefisien sebesar $-9.478E-012$ artinya jika variabel eksogen lainnya bernilai tetap dan moderat

1 mengalami kenaikan 1 (satu miliar rupiah), maka ketimpangan pendapatan mengalami penurunan sebesar $-9.478E-012$. Kemudian terlihat dari tabel bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel $-2.666 < 2.015$ serta diperoleh nilai signifikan sebesar 0.045 (sig. < 0.10).

Hasil penelitian ini mempunyai arti bahwa dana perimbangan mampu memberikan dampak atau pengaruh kurang baik dan nyata pada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan Provinsi Kalimantan Timur, dengan dana perimbangan menjadi variabel moderasi akan menambahkan dampak pengaruh atau memperlemah Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa dana perimbangan yang menjadi variabel moderasi murni (pure moderator) pada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan memperlemah atau memperlambat mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Kebijakan desentralisasi fiskal yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur yang dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menjadi kebijakan keuangan yang dikeluarkan negara untuk memengaruhi perekonomian menggunakan pengeluaran dalam rangka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat, pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau yang terkena kebijakan tersebut.

Dana Perimbangan sebagai variabel moderasi dari variabel Investasi Swasta terhadap ketimpangan pendapatan

Hasil analisis menunjukkan Variabel Moderat 2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Terlihat dari nilai koefisien sebesar $1.000E-013$, artinya jika variabel eksogen lainnya bernilai tetap dan moderat 2 mengalami kenaikan 1 (satu triliun rupiah), maka ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan sebesar $1.000E-013$. Kemudian terlihat dari tabel bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel $2.536 > 2.015$ serta diperoleh nilai signifikan sebesar 0.052 (sig. < 0.10).

Hasil penelitian ini mempunyai arti bahwa dana perimbangan sebagai variabel moderasi murni (pure moderator) tidak mampu memberikan dampak baik dan nyata pada pengaruh investasi swasta terhadap ketimpangan pendapatan provinsi Kalimantan Timur, justru dengan dana perimbangan menjadi variabel moderasi akan mengurangi dampak pengaruh secara langsung investasi swasta terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur atau memperlemah investasi swasta terhadap ketimpangan pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah memperburuk iklim investasi di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan sebagai daerah otonom seharusnya dengan kelimpahan alam tersebut dan didukung dengan tambahan biaya yang bersumber dari dana perimbangan seharusnya mampu meningkatkan gairah investasi provinsi Kalimantan Timur.

Kebijakan desentralisasi fiskal ini yang seharusnya mampu merangsang perekonomian Kalimantan Timur dikarenakan penggunaan anggaran kurang kearah percepatan pembangunan infrastruktur publik baik jalan maupun irigasi, sehingga percepatan investasi dan proses berinvestasi kurang maksimal.

Berdasarkan pembahasan, dari keseluruhan uraian mengenai pengaruh dana perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan investasi swasta terhadap ketimpangan pendapatan Provinsi Kalimantan Timur maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini mempunyai arti bahwa setiap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi akan menaikkan ketimpangan pendapatan yang begitu berarti/besar di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Variabel Investasi swasta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini mempunyai arti bahwa setiap peningkatan Investasi swasta akan mengurangi ketimpangan pendapatan yang begitu berarti/besar di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini mempunyai arti bahwa setiap peningkatan dana perimbangan akan meningkatkan ketimpangan pendapatan namun tidak begitu berarti/besar di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Variabel Dana perimbangan sebagai variabel moderasi antara Pertumbuhan Ekonomi dengan ketimpangan pendapatan memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan, kemudian dana perimbangan sebagai variabel moderasi murni (pure moderator) memperlemah pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan. Pada dasarnya Pertumbuhan Ekonomi lebih mampu menurunkan ketimpangan pendapatan apabila tidak ditambahkan dana perimbangan sebagai variabel moderasi antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur
5. Variabel Dana perimbangan sebagai variabel moderasi antara Investasi Swasta dengan ketimpangan pendapatan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan, dan dana perimbangan sebagai variabel moderasi murni (pure moderator) memperlemah pengaruh investasi swasta terhadap ketimpangan pendapatan. Pada dasarnya Investasi swasta akan lebih mampu menurunkan ketimpangan pendapatan apabila tidak ditambahkan dana perimbangan sebagai variabel moderasi antara investasi swasta terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran berkaitan dengan upaya menurunkan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

6. Perlu adanya tindakan dan kebijakan ekonomi yang integratif atau terpadu. Secara parsial, variabel yang diteliti tidak menunjukkan signifikansi yang nyata. Sehingga perlu suatu kebijakan yang bersifat menyeluruh agar dapat berfungsi dan berpengaruh.
7. Pemerintah harus lebih memperhatikan alokasi anggaran yang proporsional guna mengurangi ketimpangan pendapatan, pengalokasian yang tepat akan membawa pengaruh dan membawa manfaat yang lebih baik.
8. Perlu ditingkatkan peran pengawasan baik dari institusi yang berwenang maupun keterlibatan dan dukungan masyarakat agar proses penyelenggaraan dapat berjalan baik dan sesuai perencanaan.
9. Meningkatkan investasi swasta dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan kepastian hukum yang sesuai dan tepat sehingga kepercayaan investor tinggi. Investasi juga diarahkan pada daerah-daerah yang kurang maju dengan membangun sarana prasarana penunjang berinvestasi.
10. Pemerintah provinsi Kalimantan Timur hendaknya meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan produktifitas. Kemudahan mengakses infrastruktur antar



daerah di Kalimantan Timur menyebabkan meningkatnya kemampuan mengakses sumberdaya, informasi, teknologi dan modal yang merupakan kunci pendorong pertumbuhan dan mengurangi ketimpangan pembangunan Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ehtisham, dan Vito Tanzi. (2002). *Managing Fiscal Decentralization. Paper*. Routledge. London
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Produk Domestik Regional Bruto dalam angka. BPS Kalimantan Timur. _____ . 2019. Berita Resmi Statistik, Tingkat Kemiskinan. BPS Kalimantan Timur.
- Baldwin, Robert E. 1986. *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi, terjemahan St.Dianjung* . Jakarta: PT Bina Aksara.
- Bappenas. 2004. *Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan Membangun Model Pengelolaan Dan Pengembangan Keterkaitan Program*. Info Kajian Bappenas Vol.1 No.2 Oktober 2004. Deputi Bidang Otonomi Daerah Dan Pengembangan Regional. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus Dan Tertinggal – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Bintoro, Tjokro Amidjojo. 1986. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jhingan, M. L., 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKP.
- Kuncoro, Sri. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan diProvinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011, skripsi, Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Noor, F, H., (2007), *Ekonomi Manajerial*. Edisi Kesatu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- P. Todaro, michael. 1993. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* edisi ke 4. Jakarta: Erlangga
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. _____ , Undang-undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. _____ , Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak. _____ , Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. _____ , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Sukirno, Sadono. 1981. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijaksanaan*. Jakarta: LPFE-UI
- Tulus, Tambunan. 2003. *Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Waluyo, Joko, 2007. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Indonesia, Parallel Session IA: Fiscal Decentralitaton 12 Desember 2017, Wisma Makara, Kmpus UI-Depok.